



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

RABU : 20 JANUARI 2021
EDISI : 00226286/GBP/II/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

RABU, 20 JANUARI 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Kementan Blokir Importir Hortikultura Tolak Wajib Tanam (MI)..... 1
 - Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih Hanya 30 Persen (R) 2
 - Kepatuhan Importir Bawang Rendah (KN) 3
 - RI Impor Bawang Putih 532 Ribu Ton (ID) 4-5

2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Ribuan Babi Di NTT Mati Karena Virus ASF (K)..... 6

3. PERKEBUNAN :
 - Waspadai Kampanye Anti Kelapa Sawit di Swiss (SI) 7
 - Honduras Ajak RI Kerja Sama Sawit (ID) 8

4. KETAHANAN PANGAN :
 - Luhut : Lumbung Pangan Di Sumut Panen Februari (RM) 9
 - Harga-Harga Naik Rakyat Ngelus Dada (RM) 10-11

5. KARANTINA PERTANIAN :
 - Kenaikan Ekspor Belum Dinikmati Pencari Sarang (K) 12

6. PERTANIAN UMUM :
 - Banjir Meluas (R)..... 13

00000000000000000000 OOO 0000000000000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikei |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Kementan Blokir Importir Hortikultura Tolak Wajib Tanam

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menegaskan setiap perusahaan atau importir produk hortikultura yang mengajukan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) harus melakukan wajib tanam. Jika tidak, perusahaan tersebut akan diblokir.

"Yang tidak menyelesaikan wajib tanam tentunya tidak akan diberikan RIPH untuk tahun selanjutnya karena dia harus menyelesaikan kewajiban tersebut," kata Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, kemarin.

Selain itu, jika dalam waktu satu tahun tidak menyelesaikan wajib tanam, perusahaan tersebut akan diblokir saat pengajuan RIPH selanjutnya.

Prihasto menyebutkan masih banyak perusahaan yang belum melunasi wajib tanam dari 2018 hingga 2020, dan

"Baru 30% realisasi wajib tanam untuk 2020. Meski demikian, perusahaan tersebut masih memiliki waktu 1 tahun untuk menyelesaikan wajib tanamnya."

Prihasto Setyanto
Dirjen Hortikultura

kemudian perusahaan yang belum melunasi masuk daftar hitam (*blacklist*) RIPH 2021. Sayangnya Prihasto tidak menyebutkan jumlah perusahaan yang belum menyelesaikan wajib tanam.

"Jadi memang banyak yang

belum melunasi, kita identifikasi dan kita *blacklist* dalam sistem. Jadi dalam sistem sudah terblokir nama-nama perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa mengajukan RIPH lagi," ujarnya.

Pada 2020 ada 79 perusahaan yang melakukan wajib tanam importir dengan target tanam 6.038 hektare. Namun, realisasi tanamnya baru 2.000 hektare. "Baru 30% realisasi wajib tanam untuk 2020. Meski demikian, perusahaan tersebut masih memiliki waktu 1 tahun untuk menyelesaikan wajib tanamnya," kata Prihasto.

Selain itu, kata dia, sepanjang 2020 realisasi RIPH untuk sayuran dan buah-buahan tidak terpenuhi. **M1-10**

Realisasi impor sayuran hanya 619.949 ton atau 52,87% dari rekomendasi 1.172.549 ton. Buah-buahan hanya 263.465 ton atau 17,10% dari rekomendasi 1.541.080 ton yang diajukan. (Iam/E-3)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 12 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih Hanya 30 Persen

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, realisasi wajib tanam bawang putih sepanjang 2020 masih sekitar 30 persen atau seluas 2.052 hektare (ha) dari total wajib tanam sebesar 6.038 ha. Jumlah perusahaan importir yang mendapatkan kewajiban tanam sebanyak 79 importir.

“Perusahaan-perusahaan ada waktu satu tahun setelah RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura) terbit untuk menyelesaikan wajib tanamnya,” kata Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Selasa (19/1).

Prihasto menjelaskan, waktu satu tahun yang dimaksud tidak bergantung pada periode tahunan. Sebagai contoh, jika RIPH diterbitkan pada Juli 2020 maka akan berlaku hingga Juli 2021. Jika kewajiban itu tidak dijalankan, Kementan tidak akan kembali menerbitkan RIPH yang membuat importir tidak dapat mengajukan surat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

Ia mencatat, 79 perusahaan tersebut mengajukan RIPH sebanyak 724.589 ton. Namun, realisasi impor hingga November 2020 baru mencapai 461.725 ton. Total kewajiban tanam seluas 6.038 ton diharapkan bisa menghasilkan produksi bawang putih dalam negeri sebanyak 36.229 ton. *P.10*

Mengutip data Ditjen Hortikultura Kementan, realisasi wajib tanam ba-

wang putih selalu tidak mencapai total kewajiban yang ada sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 2017.

Pada 2017, dari target tanam sebanyak 8.335 ha, realisasi hanya mencapai 3.125 ha. Memasuki 2018, total target tanam mencapai 7.884 ha, tetapi realisasinya hanya mencapai 4.247 ha. Sementara itu, pada 2019, target tanam seluas 6.341 ha, tetapi lagi-lagi realisasi berada di bawahnya, yakni hanya 3.961 ha.

Pada 2021, Prihasto menyampaikan, Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih sebanyak 46.980 ton. RIPH itu diberikan kepada lima perusahaan importir bawang putih. Namun, untuk data wajib tanam yang dimulai pada 2021, Prihasto belum menjelaskan secara detail.

Kebijakan wajib tanam menjadi bagian penting dari pencapaian swasembada bawang putih di Indonesia. Dari setiap RIPH yang diterbitkan Kementan, importir mendapatkan tugas untuk menanam bawang putih di Indonesia sebanyak lima persen dari total importasinya.

Kementerian Pertanian menyatakan, total kebutuhan impor bawang putih sepanjang 2021 sebanyak 532 ribu ton. Jumlah itu menurun sekitar 5,3 persen dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan impor tahunan sebesar 560 ribu ton. Prihasto mengatakan, ketersediaan bawang putih, baik impor maupun lokal, pada akhir 2020 sebanyak 134 ribu ton.

“Kemudian, pada Januari akan tersisa 85 ribu ton dan Februari tersisa 42

ribu ton. Namun, mulai Maret-April ini sudah mengalami *shortage* (kekurangan),” kata Prihasto.

Tahun ini, ia mengeklaim akan terdapat produksi sekitar 98.387 ton dengan ketersediaan pasokan 59 ribu ton. Dengan kalkulasi itu, Prihasto mengatakan, perkiraan kekurangan bawang putih yang mesti dipenuhi dari impor diperkirakan sebanyak 532 ribu ton.

Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta agar pelaksanaan wajib tanam oleh importir tidak dicampur dengan kegiatan penanaman bawang putih yang dibiayai langsung oleh negara. Itu demi menghindari adanya tindak penyalahgunaan oknum di lapangan sekaligus mempermudah pengawasan terhadap para importir. ■ ed: ahmad fikri noor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 14 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

HORTIKULTURA

Kepatuhan Importir Bawang Rendah



ANTARA/Okky Lukmansyaha

Baru 30% realisasi wajib tanam tahun 2020.

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) melaporkan bahwa realisasi aturan kewajiban menanam bawang putih bagi importir pada 2020 berjalan lambat. Dari total target tanam seluas 6.038 hektare (ha) baru sekitar 2.077 ha atau hanya 34,4% saja.

"Tapi perusahaan tersebut masih memiliki waktu satu tahun untuk menyelesaikan wajib tanamnya setelah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) terbit," ujar Direktur Jenderal Hortikultura Kemtan Prihasto Setyanto, Selasa (19/1).

Prihasto menyebutkan saat ini terdapat 79 importir yang terkena aturan kewajiban menanam bawang putih di tahun 2020. Adapun, volume RIPH dari seluruh perusahaan ini sebesar 724.589 ton.

Berdasarkan data Kemtan, produksi bawang putih dari realisasi wajib tanam 2.077 ha

tersebut sebesar 8.061 ton. Padahal, dari target wajib tanam seluas 6.038 diharapkan bisa menambah produksi bawang putih hingga 36.229 ton.

Berdasarkan data evaluasi RIPH bawang putih 2017-2020, realisasi kewajiban tanam bawang putih tak pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. (lihat tabel)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH, disebutkan pelaku usaha yang mengimpor produk hortikultura strategis wajib melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis dalam negeri.

Namun, dalam Permentan Nomor 46 tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis, disebutkan kegiatan pengembangan bawang putih dikecualikan untuk pelaku usaha impor

bawang putih yang tidak mendapatkan persetujuan impor.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kemtan membagi kegiatan pengembangan bawang putih per kabupaten, sehingga jelas wilayah pengembangan yang dibiayai APBN dan importir.

Lidya Yuniartha Panjaitan

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih oleh Importir

Tahun	Izin RIPH		Luas Taam (Ha)	
	Perusahaan	Volume (Ton)	Realisasi	Target
2017	81	1 juta	3.128	8.335
2018	85	946.022	4.247	7.884
2019	75	760.933	3.961	6.341
2020	79	724.589	2.077	6.038

Sumber: Kementerian Pertanian dan Riset KONTAN

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20 / 1 / 2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 11 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

RI Impor Bawang Putih 532 Ribu Ton

Oleh **Ridho Sukra** *J.P. II*

► **JAKARTA** – Indonesia masih harus mengimpor 532 ribu ton bawang putih untuk memenuhi kebutuhan tahun ini, komoditas tersebut harus sudah masuk ke Tanah Air mulai Maret karena stok sisa tahun lalu hanya cukup sampai Februari 2021. Kemampuan produksi bawang putih lokal hingga saat ini baru sebesar 98 ribu ton dan yang bisa digunakan 59 ribu ton, sementara kebutuhan komoditas tersebut per tahun hampir 600 ribu ton.

Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menjelaskan, produksi bawang putih tahun ini diperkirakan 98.387 ton dan yang bisa digunakan 59.032 ton, sementara kebutuhan diperkirakan 591.596 ton yakni untuk konsumsi rumah tangga 492.779 ton, industri horeka dan pedagang kaki lima 49.277 ton, benih 24.911 ton, dan industri 24.638 ton. "Kita lihat dari neraca, bawang putih tahun ini masih minus 532.564 ton, ini yang harus dipenuhi dari impor. Stok awal dari sisa tahun lalu ada 134.576 ton, untuk Januari 85 ribu ton dan Februari 42 ribu ton. Mulai Maret, April, kita sudah *shortage*, ini yang harus dipenuhi dari impor 532 ribu



Prihasto Setyanto

ton tersebut," kata dia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (19/1).

Prihasto menjelaskan, se-

benarnya masih ada sisa izin impor tahun lalu yang belum direalisasikan karena surat persetujuan impor (SPI) baru keluar Desember namun itu belum diperhitungkan karena batas waktu izin hanya sampai Februari. Untuk kepentingan impor sendiri, saat ini Kementan telah menerima pengajuan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih sebesar 47 ribu ton. Untuk 2021, Kementan telah menerima pengajuan RIPH untuk sayuran dan buah sebesar 157.052 ton dengan komoditas seperti wortel, bawang putih, bawang bombai, jeruk, anggur, lemon, apel, dan lengkung. "Negara asal seperti Afrika, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Tiongkok, Jepang, Korsel, dan Selandia Baru," ujar dia.

Lebih jauh Prihasto mengatakan, impor bawang putih telah menunjukkan penurunan, meski belum signifikan. Impor tahun ini yang diperkirakan 532 ribu ton misalnya, itu turun sekitar 5% dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 560 ribu ton. Hal itu karena produksi bawang putih lokal sudah bisa untuk benih dan sedikit konsumsi. Ditjen Hortikultura Kementan akan terus menggenjot program wajib tanam bawang putih bagi para importir komoditas tersebut. "Untuk tahun 2020 ada 79 importir yang mendapat RIPH dan melakukan wajib tanam bawang putih dengan target 6.000 hektare (ha), ini realisasinya baru 2.000 ha atau 30%. Ini yang kami dorong agar perusahaan-perusahaan itu

segera menjalankan wajib tanam, mereka punya kesempatan menyelesaikan wajib tanam hingga satu tahun setelah RIPH terbit," jelas Prihasto.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta Kementan untuk berhati-hati dalam menerbitkan RIPH khususnya untuk bawang putih. Profil importir harus dilihat dengan benar, termasuk mengecek kebenaran alamat kantor, kepemilikan gudang, dan luasan gudang. Dalam salah satu kesimpulan rapat dalam RDP tersebut juga disebutkan, Komisi IV DPR meminta Kementan untuk meninjau peraturan menteri pertanian (permentan) tentang RIPH dan melakukan perbaikan dengan mengatur kewajiban importir produk hortikultura untuk memiliki gudang sendiri/sewa serta bangunan pendingin untuk produk yang diimpor.

Sementara untuk membantu mempercepat produksi bawang putih lokal, Komisi IV DPR meminta Kementan untuk mengkaji mekanisme penetapan lokasi wajib tanam bawang putih maksimal tiga hamparan dan tidak tersebar, dengan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 11 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

harapan pengawasan produksi bawang dengan dana APBN dan dengan wajib tanam menjadi lebih mudah. Komisi IV DPR juga meminta pemerintah mengkaji kebijakan pengembangan bawang putih melalui mekanisme wajib tanam bagi perusahaan importir, apabila sulit pengawasannya maka importirlah yang menyediakan benih bawang putih bagi petani sebagai kompensasi dari izin RIPH yang diperolehnya.

Daya Saing Hortikultura

Sementara itu, Ditjen Hortikultura Kementan telah menetapkan langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan hortikultura, salah satunya dengan Gerakan Mendorong Produksi (Gedor Horti) yang mampu meningkatkan daya saing serta ramah lingkungan. Pelaksanaan Gedor Horti akan dilakukan melalui paradigma atau konsepsi baru yaitu membangun hor-

tikultura pro-petani secara terintegrasi.

Kemudian pengembangan kawasan buah dengan mengacu pada pengembangan kampung-kampung, bantuan sarana prasarana pascapanen, dan pengolahan diberikan satu paket.

Prihasto mengatakan, pengembangan hortikultura harus dilakukan melalui terobosan khusus yaitu dengan inovatif, langkah yang sebelumnya tidak berhasil harus ditinggalkan

dan mencari cara yang baru. Optimisme potensi keberadaan petani milenial sebagai salah satu agen perubahan perlu dilakukan untuk manajemen agribisnis yang lebih baik dan tanggap terhadap kemajuan teknologi. Terobosan baru di subsektor hortikultura tersebut diharapkan dapat menjadikan komoditas hortikultura dan sektor pertanian umumnya sebagai penopang dan andalan perekonomian nasional. (t)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 1/10/ |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Ribuan Babi di NTT Mati karena Virus ASF

LARANTUKA — Sebanyak 1.600 ekor ternak babi di Flores Timur dan 665 ekor di Lembata Timur, Nusa Tenggara Timur, mati terserang virus demam babi Afrika (*African swine fever*/ASF) sejak November 2020. Jumlah ini belum termasuk kabupaten lain di Flores dan Sumba. Serangan ASF merupakan yang kedua setelah periode Desember 2019-Juli 2020. Sekretaris Dinas Peternakan Flores Timur Simon Nani mengatakan, hasil pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Veteriner di Denpasar pada November 2020 menunjukkan, spesimen babi yang dikirim Pemkab Flores Timur dinyatakan positif terinfeksi ASF. Puncak kematian ternak babi terjadi 19-24 Desember 2020. "Jumlah babi mati akibat ASF sesuai laporan masyarakat pada November 2020-11 Januari 2021 sebanyak 1.600 ekor. Diduga, masih banyak yang tidak dilaporkan karena masyarakat merasa babi sudah mati, melapor pun tidak ada manfaat lagi," kata Nani, Selasa (19/1/2021). (KOR) K.1



Harga Tinggi, Pedagang Daging Mogok Jualan

Para pedagang daging yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) mogok berjualan menyusul kenaikan harga daging impor. Kenaikan itu berdampak pada turunnya margin pedagang. Sebab, pada saat yang sama pedagang terikat oleh aturan harga eceran di tingkat konsumen. Sekretaris APDI DKI Jakarta Tubagus Mufti Bangkit Sanjaya menyatakan, mogok berjualan dimulai Selasa (19/1/2021). "Kami tak kuat lagi dengan tingginya biaya impor sapi hidup Australia," katanya. Menurut dia, kenaikan harga sapi hidup impor berlangsung sejak pertengahan 2020, yakni dari Rp 80.000 per kilogram (kg), lalu menjadi Rp 96.000 per kg di Desember 2020. Setelah ditambah biaya pemotongan dan pemisahan daging, harga ecerannya di pasar menjadi Rp 120.000 per kg. (DNE) < .10

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input checked="" type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/11/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 6 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Waspadai Kampanye Antikelapa Sawit di Swiss

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak semua pihak mewaspadai kampanye anti-masuknya kelapa sawit di Swiss. Pasalnya, hal tersebut bisa menjadi preseden bagi kampanye serupa di negara lain, khususnya di Uni Eropa.

Hal ini dinyatakan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menanggapi gerakan Uniterre, sebuah LSM di Swiss, yang mulai melakukan kampanye resmi untuk referendum antikelapa sawit. Seperti diketahui, Swiss menganut demokrasi langsung di mana pengambilan keputusan di level negara sering dilakukan melalui referendum. Isu kelapa sawit diangkat oleh LSM di Swiss dan berhasil dimasukkan sebagai agenda dalam referendum mendatang.

Isu antikelapa sawit mulai mengemuka beberapa tahun ini di Uni Eropa, dipelopori oleh gerakan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Mereka mengangkat isu-isu lingkungan, sosial, dan kesehatan untuk meyakinkan pengambil kebijakan agar melarang kelapa sawit asal Indonesia. *Sl. 6*

Akibatnya, terjadi diskriminasi kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Salah satunya menyangkut produk turunannya, yaitu biodiesel. Pemerintah Indonesia sedang menggugat diskriminasi tersebut di World Trade Organization (WTO). Saat ini gugatan sudah masuk dalam tahap pembentukan panel.

Jerry Sambuaga, yang menjadi pimpinan delegasi dalam sidang gugatan diskriminasi kelapa sawit di WTO, menilai bahwa berbagai kampanye dan pelarangan yang terjadi merupakan refleksi persaingan dagang dan tidak berpijak pada fakta yang sebenarnya. "Ini refleksi ketakutan mereka terhadap tingginya daya saing kelapa sawit Indonesia. Jika bersaing secara sehat, kelapa sawit Indonesia jauh lebih murah dan lebih kompetitif daripada minyak nabati mereka yang berbahan *rapeseed* dan sejenisnya," kata Jerry melalui siaran pers kemarin.

Mengenai berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada kelapa sawit Indonesia, Jerry menegaskan hal itu tidak beralasan dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya. "Kita

sudah membuktikannya di sidang WTO. Mereka kesulitan, bahkan tidak bisa, menjawab ketika kita tanyakan aspek-aspek yang menjadi alasan mereka melarang produk kelapa sawit Indonesia. Ini membuktikan bahwa alasan sebenarnya dari hal ini adalah karena ketakutan untuk bersaing secara terbuka dengan sawit," paparnya.

Jerry menekankan industri kelapa sawit Indonesia terus berproses menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek lingkungan, sosiologis, dan kesehatan. Indonesia, misalnya, berkomitmen untuk menjaga lebih dari 50% hutannya agar tetap lestari. Angka ini jauh lebih besar daripada komitmen negara-negara Uni Eropa yang saat ini hanya memiliki hutan belasan persen saja dari wilayahnya. Sebagian negara bahkan tutupan hutannya tidak sampai 10%.

Wamendag menilai kampanye oleh berbagai LSM di Uni Eropa yang antikelapa sawit Indonesia dilakukan secara sistematis. Karena itu, Indonesia harus melakukan kontrak kampanye agar wacana mengenai kelapa sawit ini berjalan berimbang dan mencerminkan kompetensi wacana yang adil.

ichsanamin

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 11 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pjok/Karikatur |

Honduras Ajak RI Kerja Sama Sawit

JAKARTA - Presiden Asosiasi Produsen Kelapa Sawit Honduras (AIPAH) Hector Castro menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dengan Indonesia guna mencukupi kebutuhan pasar ekspor minyak sawit Honduras sebesar 400 ribu metrik ton per tahun. Kebutuhan pasar minyak sawit itu tidak dapat dicukupi oleh Honduras akibat badai Eta dan Iota yang merusak lebih dari 18.600 hektare (ha) lahan sawit di negara tersebut pada November 2020. **19. 11**

Menurut keterangan tertulis KBRI Panama City yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (19/1), keinginan itu disampaikan Castro dalam pertemuan virtual antara Duta Besar RI di Panama City Sukmo Harsono dengan AIPAH pada Senin (18/1). Castro menjelaskan, Indonesia adalah mitra penting Honduras dalam pengembangan sawit Honduras. "Karena itu, kami berharap

dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk membantu mengembangkan sektor sawit Honduras," ujar dia. Presiden AIPAH itu juga menyampaikan permohonan bantuan kepada RI berupa bantuan bibit dengan rendemen tinggi untuk ditanam di 18.600 ha areal perkebunan yang rusak akibat terjangan badai Eta dan Iota.

AIPAH juga meminta bantuan pupuk, peralatan pertanian, peralatan untuk perbaikan infrastruktur sekitar 9.696 kilometer (km) jalan dan jembatan yang rusak, serta bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas di bidang teknik pertanian dan industri kelapa sawit. Pertemuan virtual itu juga diikuti oleh Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Mauricio Guevara dan Wakil Menteri Pertanian David Ernesto Wainwright Ortega. "Sebagai sesama negara produsen kelapa sawit yang tergabung dalam CPOPC

kami berharap Indonesia dapat memberikan bantuan bagi pemulihan sektor kelapa sawit di Honduras usai Covid-19 serta pascaterjangan badai Eta dan Iota," kata Menteri Guevara.

Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) adalah organisasi antarpemerintah untuk negara-negara penghasil minyak sawit. Sementara itu, Wakil Menteri Ortega menyampaikan pula pentingnya kerja sama Indonesia dan Honduras di sektor sawit guna mengembangkan sektor kelapa sawit dan membantu kehidupan para petani dan keluarganya yang terdampak, baik pandemi Covid-19 maupun badai Eta dan Iota.

Ketika menanggapi permintaan Honduras tersebut, Dubes Sukmo mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong realisasi kerja sama Indonesia-Honduras di bidang sawit. (ti)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input checked="" type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Progresnya Menggembirakan

Luhut: Lumbung Pangan Di Sumut Panen Februari

Jika tak ada aral melintang, Food Estate atau lumbung pangan di Sumatera Utara (Sumut) sudah bisa dipanen pada Februari 2021.

HAL itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, lahan Food Estate sudah terbuka 200 hektare (ha) di Sumut.

Dari 200 ha tersebut, 73 persen sudah ditanami tiga komoditas, yaitu kentang, bawang merah dan bawang putih.

"Kemarin saya ke sana melihat lahannya, sudah ditanami. Diperkirakan minggu kedua Februari 2021 sudah bisa panen," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Food Estate di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, kemarin. *RM. 0*

Dari laporan Kementerian Pertanian, hingga 12 Januari 2021, sudah tersedia lahan terbuka dan siap tanam. Pemerintah juga telah melaksanakan survei identifikasi dan desain untuk area baru seluas 785 ha.

Selain itu, lanjut Luhut, Ke-

menterian Pertanian juga sudah memiliki desain Jalan Usaha Tani. Usulan pembangunannya akan dilakukan setelah usulan pendanaan disetujui.

Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini juga sedang dibuat *reservoir* (penampungan) air dengan kapasitas 1.000 meter kubik.

"Konstruksi irigasi tersebut dibangun untuk lahan seluas 200 hektare. Pengerjaan ini ditargetkan selesai pada triwulan II-2021," kata Luhut.

Sementara, untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sudah ada laporan 87 bidang tanah telah disertifikasi di area 200 ha.

Kendati begitu, ada juga kendala terkait kepemilikan tanah di lumbung pangan.

"Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria/Kepala BPN) bilang, salah satunya karena banyak lah-

an yang kepemilikannya sudah turun menurun," ujar Luhut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada para kepala daerah, khususnya di wilayah yang akan dibangun lumbung pangan untuk mempercepat perizinan di lapangan.

"Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, saya minta agar para Gubernur yang daerahnya berkaitan dengan program ini untuk mempercepat perizinan," pinta Jokowi.

Jokowi menunjuk Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap proyek yang dimulai pada kuartal terakhir 2020.

Sejauh ini, Pemerintah telah menetapkan dua lokasi *food estate*, yaitu di Kalimantan Tengah dan Sumut. Dimulai dari dua titik tersebut, nantinya program akan diperluas ke daerah-daerah potensial lainnya.

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, perluasan lahan

bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Perluasan lahan pertanian saat ini sulit dilakukan, mengingat terbatasnya jumlah lahan yang masih memungkinkan dipakai untuk kegiatan pertanian. Belum lagi soal jumlah penduduk yang terus meningkat.

"Pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan efisiensi lahan yang sudah ada, peningkatan kapasitas petani dan revitalisasi alat pertanian serta pabrik-pabrik yang sudah tua," kata Felippa dalam rilisnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Menurutnya, revitalisasi alat pertanian dan mesin pengolahan juga penting dilakukan karena hal ini sangat mempengaruhi produktivitas pangan.

"Untuk itu, lanjut Felippa, Pemerintah seharusnya mendukung pengembangan teknologi pertanian dan mendorong peningkatan investasi untuk riset dan pengembangan.

"Penguasaan teknologi di kalangan petani juga belum menjadi sesuatu yang memasyarakat. Ini tentu membutuhkan waktu," ungkap Felippa. ■ NOV

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input checked="" type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Tol, BPJS, Kedelai, Tahu, Tempe, Daging, Cabe, Telur...

Harga-harga Naik Rakyat Ngelus Dada

Sejak awal tahun, berbagai kado pahit berupa kenaikan harga-harga, datang beruntun. Dimulai dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, berlanjut kenaikan tarif tol. Di saat bersamaan, harga berbagai bahan pokok juga naik. Mulai dari kedelai, tahu, tempe, telur, cabe, dan teranyar daging sapi. Menghadapi kenyataan ini, ditambah getirnya serangan Corona yang sudah berbulan-bulan ini, rakyat hanya bisa mengelus dada. RM

KABAR pertama datang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menaikkan iuran kelas III. Per 1 Januari 2021, iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUP)

dan Bukan Pekerja (BP) atau Kelas III mandiri, kini Rp 35.000 per bulan atau naik Rp 9.500 dari sebelumnya Rp 25.500. Pemerintah memutuskan mengurangi bantuan iuran dari Rp 16.500 menjadi Rp 7.000 per orang.

Tak lama setelah itu, datang kabar kenaikan tarif tol. Mulai 17 Januari 2021, Jasa Marga menaikkan tarif tol di sembilan ruas jalan tol di Pulau Jawa. Kenaikan bervariasi dari Rp 500 sampai Rp 3.000. Kenaikan tarif berlaku pada semua golongan kendaraan.

Di saat yang bersamaan, harga berbagai bahan pangan juga merangkak naik. Diawali dengan kenaikan harga telur. Kenaikan harga telur sudah dirasakan sejak Desember tahun lalu. Di sejumlah pasar tradisional, harga telur melonjak hingga Rp 30 ribu per kilogram. Padahal

biasanya harga telur ayam di kisaran Rp 22-Rp 23 ribu per kilogram.

Setelah itu, gantian harga kedelai yang melonjak. Kenaikan itu membuat perajin tahu dan tempe protes dan melakukan mogok kerja selama tiga hari, awal Januari lalu. Setelah itu, harga tahu dan tempe yang biasa dibanderol Rp 4 ribu naik seribu menjadi Rp 5 ribu.

Harga cabe rawit juga ikut naik. Sejak akhir tahun lalu, sampai pertengahan Januari 2021, harga cabe rawit masih terus

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

<input type="checkbox"/> Tanaman Pangan	<input type="checkbox"/> Litbang Pertanian
<input type="checkbox"/> Hortikultura	<input checked="" type="checkbox"/> Ketahanan Pangan
<input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan	<input type="checkbox"/> Karantina Pertanian
<input type="checkbox"/> Perkebunan	<input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
<input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian	<input type="checkbox"/> Pertanian Umum

MEDIA

<input type="checkbox"/> Agro Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Jakarta	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	TANGGAL 20/1/2021
<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	HALAMAN 1 / 1
<input type="checkbox"/> Indo Pos	<input type="checkbox"/> Majalah Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Tani	RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita
<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Berita Foto
<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Pelita	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Opini/Artikel
<input type="checkbox"/> Kompas	<input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> The Jakarta Post	<input type="checkbox"/> Tajuk
<input type="checkbox"/> Kontan	<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Fajar	<input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur

melonjak. Tadinya harganya dipatok Rp 40 ribu per kilogram, sekarang menjadi Rp 60 ribu bahkan bisa mencapai Rp 90 ribu per kilogram. Kenaikan disebabkan pasokan yang berkurang. Kenaikannya diperkirakan bertahan hingga Februari nanti.

Teranyar adalah kenaikan harga daging sapi. Sepekan terakhir, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, terus meroket. Harga daging sapi khas atau bagian paha belakang naik dari Rp 100 ribu menjadi Rp 125 ribu per kilogram. Sementara harga daging sapi mumi naik dari Rp 110 ribu menjadi Rp 121 ribu per kilogram.

Kenaikan harga daging sapi itu membuat sejumlah pedagang daging di Jabodetabek melakukan mogok jualan mulai hari ini sampai Jumat mendatang. Aksi ini merupakan protes Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) kepada pemerintah karena tingginya harga daging sapi di pasar sejak awal tahun.

Ketua Umum APDI, Asnawi belum bisa bicara banyak kenapa para pedagang memutuskan mogok jualan. Pedagang juga akan melakukan rapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membahas ini.

"Besok (hari ini) saya sampaikan bagaimana hasilnya," kata Asnawi, kemarin.

Bagaimana tanggapan DPR dengan kenaikan harga-harga tersebut? Ang-

gota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, sudah mewanti-wanti pemerintah terkait gejolak harga pangan sejak awal tahun lalu.

Saat itu, berbagai komoditas pangan seperti kedelai, cabe, telur ayam, hingga daging sapi, mulai melonjak. Namun, hal itu rupanya tidak dijadikan peringatan dini oleh pemerintah. Akibatnya, berbagai komoditas pangan meroket di awal tahun ini.

"Persoalan ini terus berulang tiap tahun. Masih banyak masalah terutama di tata niaga. Ada indikasi, pasokan ditahan agar harga naik untuk menikmati keuntungan yang besar," kata Andi, kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Kondisi ini, kata dia, harus jadi atensi Satgas Pangan. Satgas harus memastikan komoditi ada di pasaran. Kalau ada kenaikan harga, segera antisipasi dengan melakukan operasi pasar.

Menurut dia, pihak yang paling terdampak dari gejolak harga pangan adalah konsumen yang kebanyakan adalah masyarakat kecil.

"Kasihannya mereka, di saat menghadapi resesi ekonomi makin kesusahan," ucapnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi ikut menyoroti kenaikan tarif tol di sembilan ruas tol di Pulau Jawa. Menurut dia, kenaikan tersebut tidak tepat di saat sekarang kondisi ekonomi belum pulih akibat resesi.

Kalau pun naik, kata Tulus, golongan kendaraan umum dan kendaraan barang, tarifnya jangan ikut dinaikkan. Pasalnya, bila tarif tol kendaraan umum dan barang naik, imbasnya berupa kenaikan harga di tengah masyarakat.

"Kalau mau lihat indikator ekonomi, ya mestinya jangan naik dulu," kata Tulus.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, sah-sah saja pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hanya saja, kenaikan ini dilakukan saat terjadi pelemahan daya beli masyarakat. "Waktunya tidak tepat. Sebaiknya ditunda saja," tukasnya.

Warganet ikut mengomentari naiknya harga-harga. @Melllsss29 berharap kenaikan harga-harga dibarengi kenaikan gaji. "Harga sembako, cabe cabean, BPJS juga naik.. semoga gaji ikutan naik.. Aamiin," cuitnya. "BPJS naik, tempe naik, tahu naik, cabe naik, telur naik, daging naik. Harga-harga naik, rakyat cuma bisa ngelus dada," ujar @SayaAdith.

@Ophan_Lamara mengaku kesal dengan oknum yang menaikkan harga di tengah kesusahan rakyat. "Mereka tega !! Saat hidup sudah sangat sesulit ini, mereka malah menaikkan harga. Harga bahan pokok juga mulai pada naik di pasar-pasar. Tega !!!" ujarnya. "Tega-teganya naikin iuran BPJS kelas 3 lagi," cuit @sri_saryani. ■ BCG

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input checked="" type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 11 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

KOMODITAS BURUNG WALET

Kenaikan Ekspor Belum Dinikmati Pencari Sarang

SEMARANG, KOMPAS — Volume ekspor sarang burung walet di Jawa Tengah meningkat 15,3 persen pada 2020 dibandingkan periode sama 2019. Sempat terhambat pada awal tahun karena pembatasan penerbangan akibat Covid-19, produksi perlahan pulih seiring peningkatan permintaan dari sejumlah negara, terutama China. Walakin, pencari sarang belum sepenuhnya menikmati hasil dari peningkatan ekspor tersebut.

Berdasarkan data Balai Karantina Pertanian Semarang, volume ekspor sarang burung walet pada 2020 mencapai 64.094 kilogram (kg) atau naik 15,3 persen dari 2019 yang sebesar 55.576 kg. Nilai ekspor juga meningkat, dari Rp 1,2 triliun pada 2019 menjadi Rp 1,5 triliun pada 2020.

Dari total ekspor burung walet melalui Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang pada 2020, sekitar 79 persen dikirim ke China. "Sisanya, antara lain, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, Singapura, dan Kanada. Peningkatan terjadi karena permintaan dari China cukup tinggi," kata Subkoordinator Bidang Karantina Hewan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, R Pratiwi A, Selasa (19/1/2021).

Pratiwi menuturkan, pada awal 2020 atau saat permulaan penyebaran Covid-19, ekspor sarang burung walet terpengaruh akibat pembatasan wilayah (*lockdown*), termasuk di China. Keterbatasan penerbangan membuat pengiriman terhambat. Namun, seiring pembukaan kembali pembatasan serta permintaan yang meningkat, pengiriman kembali pulih.

Pada 2020, terdapat 94 eksportir sarang burung walet yang mengirim produk melalui Balai Karantina Pertanian Semarang. Bahan baku berasal dari Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah daerah di Jateng. Sementara harga produk ekspor berkisar Rp 10 juta-Rp 40 juta per kg. "Sarang burung walet sudah lama diekspor. Sempat menurun 2016, lalu meningkat tiga tahun terakhir," kata Pratiwi.

Direktur PT Waleta Asia Jaya, Salatiga, Djoko Hartanto, menuturkan, pada awal 2020, ekspor sarang burung walet terkendala kebijakan *lockdown*.

"Mei 2020 sudah terasa membaik. Kembali kencang. Bisa dikatakan, permintaan sarang burung walet meningkat di China karena dikonsumsi untuk penambah stamina tubuh. Ada *sialic acid* (asam sialat) yang kandungannya hingga 10 persen," ujar Djoko.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo me-

nyebut, tren ekspor sarang burung walet secara nasional meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Data sistem perkarantina Badan Karantina Pertanian, Kementan, IQ-FAST, mencatat selama pandemi Covid 19, jumlah ekspor sarang burung walet 1.155 ton dengan nilai Rp 28,9 triliun atau meningkat 2,13 persen dari pencapaian pada 2019 yang 1.131,2 ton atau senilai Rp 28,3 triliun.

Dari Kebumen, Jateng, dilaporkan, pencari sarang burung walet di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, tidak menikmati langsung kenaikan ekspor komoditas ini. Pemasukan yang didapat pencari sarang burung walet hanya berkisar Rp 500.000-Rp 1 juta sekali panen.

"Sekali panen dapatnya 3-4 kilogram. Harganya berkisar Rp 3 juta-Rp 5 juta per kilogram. Kalau kualitasnya sangat bagus, ya, sekitar Rp 7 juta per kilogram. Dengan sistem bagi hasil, bisa terima antara Rp 500.000-Rp 1 juta per orang," kata Miran (45), pencari sarang burung walet Desa Karangduwur.

Dalam setahun, sarang burung bisa dipanen 3-4 kali. Untuk memanen, diperlukan 10-15 orang karena sarang burung ada di dalam goa yang terletak di tebing curam. (DIT/DKA)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tanaman Pangan | <input type="checkbox"/> Litbang Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Hortikultura | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> Peternakan dan Kesehatan Hewan | <input type="checkbox"/> Karantina Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Perkebunan | <input type="checkbox"/> Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| <input type="checkbox"/> Prasarana dan Sarana Pertanian | <input checked="" type="checkbox"/> Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2021 |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani | RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post | <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar | <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Banjir Meluas

Kerugian mulai dari kerusakan bangunan hingga gagal panen.

■ RIZKY SURYARANDIKA

JAKARTA — Kejadian banjir dan banjir bandang meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Lokasi banjir tersebar dari Aceh hingga Halmahera Utara, Maluku Utara.

Dari wilayah paling barat, ratusan hektare lahan persawahan masyarakat di Kabupaten Pidie, Aceh, terendam banjir yang melanda sejumlah kawasan tersebut sejak dua hari terakhir. "Berdasarkan data sementara, seluas 958,25 hektare lahan persawahan di Pidie terendam banjir," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Pidie Sofyan, yang dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.

Sofyan menyebutkan, lahan persawahan yang terendam banjir itu tersebar di beberapa kecamatan, yakni Peukan Baro dan Simpang Tiga masing-masing satu hektare, Kembang Tanjong 69 hektare, Glumpang Baro 19 hektare, Glumpang Tiga dua hektare, dan Mutiara Timur tujuh hektare.

Kemudian, Kecamatan Keumala 0,5 hektare, Pidie 27,5 hektare, Mila 44 hektare, Padang Tiji seluas 362 hektare, dan paling luas di Delima mencapai 425,25 hektare. "Paling tinggi yang terendam banjir itu dua kecamatan, yaitu Padang Tiji dan Delima," ujar Sofyan.

Banjir bandang juga melanda Komplek

Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Selasa (19/1). Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pukul 09.00 WIB. "Akibat hujan deras yang terus-menerus, kali daerah setempat meluap dan mengakibatkan banjir bandang," ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Budi Pranowo, Selasa (19/1).

Kepala Desa Tugu Selatan, M Eko Windiana menjelaskan, akibat kejadian tersebut terjadi kerusakan yang luar biasa di sejumlah bangunan setempat. Diperkirakan, untuk sementara, ada sekitar tujuh bangunan yang terdampak.

Dua desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, diterjang banjir susulan pada Senin (18/1) malam hingga Selasa, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Dua desa yang dilanda banjir susulan, yakni Desa Curahnongko dan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, Heru Widagdo mengatakan, beberapa warga sudah mulai mengungsi di rumah saudaranya, yang lokasinya aman dari genangan banjir. Namun, ada juga sebagian warga yang mengungsi di posko pengungsian di Kantor Desa Wonoasri pada pukul 04.00 WIB. "Ada sekitar 10 orang yang mengungsi di posko pengungsian dan sebagian

besar anak-anak dan lansia," tuturnya.

Di Pulau Kalimantan, selain di Kalimantan Selatan, banjir juga terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Setidaknya ratusan rumah di sana dilaporkan terendam air bah.

"Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan luapan pada daerah aliran sungai (DAS) Sungai Sembakung, dengan ketinggian permukaan air mencapai 100 sentimeter," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, dalam keterangan pada Selasa (19/1).

Raditya menyebut beberapa lokasi terdampak banjir, antara lain, Kecamatan Sembakung, Desa Atap, Desa B. Bagu, Desa Labuk, Desa Pagar, Desa Tujung, Desa M. Bungkul, Desa Lubukan, Desa Tagul, Desa Pelaju, dan Desa Tepian. Hal ini berdasarkan data yang dihimpun hingga 19 Januari 2021 pukul 11.10 WIB.

"Tercatat kerugian materil, antara lain 533 unit rumah terendam, satu unit masjid terendam, satu unit posyandu terendam, satu unit pustu terendam, 115 hektare lahan sawah terendam, dua hektare lahan kebun terendam yang berdampak pada 2.752 jiwa," ujar Raditya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga meninjau kondisi warga terdampak banjir Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, kemarin, Risma mengemukakan dirinya telah menyiapkan personel Tagana untuk membantu warga, yang menjadi korban agar mendapatkan kebutuhan, berupa makanan dan minuman.

Selain itu, ada rumah yang rusak harus didata untuk diajukan ke Kementerian Sosial. Dengan demikian, dapat meringankan beban warga, yang terkena dampak banjir Halmahera Utara. Untuk pembangunan jembatan yang rusak disampaikan ke Kementerian PUPR agar dapat dilakukan pengerjaan.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba mengatakan, bantuan telah tersalur kepada 1.537 kepala keluarga dan 6.963 jiwa yang terdampak banjir Halmahera Utara. Dia menyebut, sebagian besar 36 ribu jiwa penduduk Galela terdampak putusnya jembatan penghubung kecamatan sehingga memengaruhi akses ekonomi masyarakat.

Banjir tersebut diakibatkan oleh hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yang disertai angin kencang dalam durasi waktu yang lama, pada Jumat (15/1) mulai pukul 16.00 WIT hingga Sabtu (16/1).